BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pada komponen masukan (*input*), terdapat persoalan belum adanya regulasi tertulis, visi, misi dan sasaran program khusus mengenai gerakan 1000 HPK. Belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan secara maksimal dalam gerakan 1000 HPK, sudah tersedianya anggaran kegiatan intervensi baik itu pada intervensi spesifik maupun sensitif. Masih kekurangan sumber daya manusia terkait gerakan 1000 HPK serta masih kekurangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan gerakan 1000 HPK di Kabupaten Pasaman tahun 2017.
2. Pada komponen proses sudah terlaksananya intervensi spesifik dan intervensi sensitif terkait gerakan 1000 HPK, namun masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana seperti pendataan ibu hamil yang terpapar asap rokok, pendataan penggunaan kelambu berinsektisida, belum adanya pemberian suplemen selain zat besi kepada ibu hamil. Pembentukan organisasi khusus tentang gerakan 1000 HPK juga belum terbentuk, partisipasi pemangku kepentingan belum maksimal sehingga kebijakan yang koheren belum dapat dilaksanakan.
3. Pada komponen *output* tidak terbentuknya komitmen khusus terhadap multisektor dalam gerakan 1000 HPK di Kabupaten Pasaman tahun 2017 telah terselesaikannya kerangka pembiayaan untuk kegiatan rutin terkait dengan gerakan 1000 HPK dan terlaksananya intervensi spesifik dan sensitif yang ditandai dengan adanya laporan kegiatan program.

4. Terdapat kendala dalam gerakan 1000 HPK seperti belum adanya penggalangan komitmen khusus terkait gerakan 1000 HPK pada tahun 2017, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan 1000 HPK, belum maksimalnya dalam melakukan monitoring evaluasi kegiatan terkait gerakan 1000 HPK.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku leading sektor dalam gerakan 1000 HPK yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013 dapat berperan sebagai promotor, penggagas dalam terbentuknya regulasi, visi, misi dan sasaran program terkait gerakan 1000 HPK di Kabupaten Pasaman. Dengan terbentuknya regulasi diharapkan dapat terbentuk penggalangan komitmen, terbentuk struktur organisasi dan timbul keterlibatan pemangku kepentingan secara maksimal dalam upaya perbaikan masalah gizi. Selain itu kepada Kepala Dinas terkait dapat melakukan permintaan terhadap sumber daya manusia yang kurang memadai (tabel 21) dan mendukung terhadap pemenuhan sarana dan prasarana (tabel 24) terkait dengan kegiatan 1000 HPK di Kabupaten Pasaman ini.

2. Disarankan kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi agar melakukan kegiatan-kegiatan intervensi spesifik yang terkait dengan gerakan 1000 HPK (tabel 26) dan melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan tersebut secara rutin, seperti monitoring evaluasi terhadap pembentukan forum masyarakat peduli ibu hamil. Melaksanakan kegiatan program yang belum mencapai target seperti ditribusi tablet tambah darah dengan membuat inovasi baru melalui penambahan outlet-outlet pendistribusian tablet Fe dan KIE ditempat-tempat umum atau pada kegiatan anak sekolah. Sehingga diharapkan intervensi dapat berjalan secara berkesinambungan dan dapat mengatasi permasalahan gizi di Kabupaten Pasaman.

3. Kepada semua instansi terkait seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perlindungan Anak. Pemangku kepentingan yang terlibat seperti Bupati, LSM, Media Massa, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dapat lebih meningkatkan kemitraan dan kerjasama dalam bentuk keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi yang terintegrasi, menganalisa kebijakan penanggulangan masalah gizi serta menjalin komitmen yang kuat sehingga permasalahan terkait gerakan 1000 HPK dapat diselesaikan.

4. Penelitian selanjutnya dapat menganalisa faktor yang berhubungan dengan disposisi (sikap) pemangku kepentingan dalam hal melaksanakan gerakan 1000 HPK.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1. ini?

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA